

TESIS

**EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
DI CATATAN SIPIL WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



MAYA INDRIA SARI

1420122035

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
DI CATATAN SIPIIL WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan*

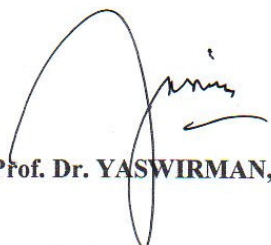
OLEH

MAYA INDRIA SARI

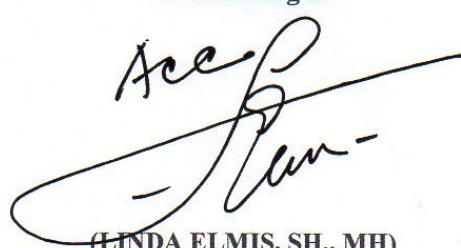
1420122035



Pembimbing I


(Prof. Dr. YASWIRMAN, SH.,MH)

Pembimbing II


(LINDA ELMIS, SH., MH)

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT

(Maya Indria Sari, 1420122035. Magister Kenotariatan Unand, 2017,93 halaman)
Pembimbing : Prof. Dr. Yaswirman, MA dan Linda Elmis, SH., MH

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 merupakan landasan berpijak baru berkaitan dengan hukum keluarga khususnya ketentuan tentang Anak Luar Kawin di Indonesia. Dengan prinsip Persamaan dihadapan hukum (equality before the law) Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada anak luar kawin yang tidak diakui ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini merupakan salah satu putusan yang kontroversial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena disamping memberikan harapan baru bagi anak luar kawin yang selama ini tidak mendapatkan kejelasan status dimata hukum dan ditengah masyarakat, putusan ini juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya umat Islam yang mayoritas di Indonesia, karena frasa “ Anak Luar Kawin” yang dianggap dapat membuka celah untuk melegalkan perzinahan. Disamping itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini juga terdapat beberapa hal yang tidak jelas dan tidak tegas diatur mengenai makna dari frasa “ Anak di Luar Perkawinan”, dan makna dari hubungan keperdataan yang dimaksud, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak- hak anak luar kawin. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat, 2) Apa akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *juridis empiris*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) putusan MK ini tidak berlaku efektif pada Dinas- dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena umumnya pendaftaran anak yang dilakukan untuk mendapatkan akta kelahiran Anak Luar Kawin terbatas pada Anak Luar Kawin dari perkawinan bawah tangan atau nikah siri, dan hampir dapat dipastikan bahwa untuk mendaftarkan Anak Luar Kawin selain anak nikah siri tidak ditemukan karena diperlukan pembuktian dokumen lain seperti Kartu Keluarga dan Surat keterangan dari wali nagari ditempat tinggal yang bersangkutan. Disamping itu petunjuk teknis untuk pelaksanaan putusan MK itu belum ada sampai saat ini. 2) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 adalah tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi status Anak Luar Kawin terutama dalam hal kewarisan, karena hubungan keperdataan yang dimaksudkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak jelas atau kabur seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Disamping itu terdapatnya perbedaan status Anak Luar Kawin dalam KUHPerduta dan putusan Mahkamah Konstitusi dimana didalam KUHPerduta hanya Anak Luar Kawin yang telah mendapat pengakuan dari ayahnya yang bisa mendapatkan warisan, sedangkan didalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan dan diatur.

Kata Kunci : Efektivitas, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin, Catatan Sipil
EFFECTIVENESS OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT No. 46 / PUU-VIII / 2010
TOWARD THE STATUS OF ILLEGITIMATE CHILDREN IN CIVIL REGISTRY SERVICE
OFFICE IN WEST SUMATRA JURIDICITION

(Indria Maya Sari, 1420122035. Graduate Program of Notary, 2017.93 page)
Supervisor: Prof. Dr. Yaswirman, MA and Linda Elmis, SH., MH

ABSTRACT

The constitutional court verdict No. 46 / PUU-VII / 2010 forms a new foundation for family law, especially in its provisions for illegitimate children in Indonesia. In accordance with the principle of equality before the law of the Constitutional Court intends to provide protection for any child who is not recognized by his biological father. The verdict of the constitutional court no 46 / PUU-VIII / 2010 is a controversial decision issued by this court because, along with providing new hope to illegitimate children who up until now had no clear legal or social status, this decision has created debate for and against in the community particularly amongst Muslims who consider the use of the term “children born to unmarried parents” may lead to a legalization of adultery. Furthermore, the verdict of the Constitutional Court is still not clear and term of “children born to unmarried parents” and the meaning of civil relationship in question so further more detailed regulation is required in order to ensure legal certainty on the rights of illegitimate children.

Therefore, the research question for this study is 1) How is the effective is the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the status of illegitimate children in civil registry service office in West Sumatra jurisdiction? 2) What legal consequences arise from the implementation of the verdict of the Constitutional Court Number 46 Year 2010 about the status of illegitimate children in civil registry service office in West Sumatra jurisdiction?

The method used in this research was juridical empirical method. Based on the analysis performed, the authors conclude several things, among others: 1) The decision of the Constitutional Court is not effective in the civil registry service office in West Sumatra jurisdiction. This is because generally enrollment to obtain a birth certificate is limited to children from unregistered marriages or marriages that have religious but not legal legitimacy and it is almost certain that issuing of birth certificate to any other children does not occur because of the necessity of obtaining evidence in the form of other documents such as the Family Identity card and Certificate of Residence from the *nagari* head of the area. In addition, no technical guidelines for the implementation of the verdict of the Constitutional Court yet exist.

2) The legal consequences arising from the implementation of the decision of the Constitutional Court Number 46 Year 2010 is the lack of legal certainty and legal protection status of illegitimate children, especially in terms of inheritance, because the civil relationship under the law intended by the Constitutional Court verdict is unclear as described previously. Moreover, there is a difference in status of illegitimate children in the Civil Code and in the verdict of the Constitutional Court where in the Civil Code the legitimate children who have received recognition from their father can inherit, whereas in the verdict of the Constitutional Court regarding this is not clarified or formulated.

Keywords: Effectiveness, the verdict of the Constitutional Court, Illegitimate children, civil registry service office